



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya usulan pergeseran Anggaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkaitan dengan penyediaan biaya administrasi kegiatan serta memperhatikan pada Pasal 162 Ayat (2), (3) dan (5)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

28. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Nomor 05 Tahun 2008);
29. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 97);
30. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 81) sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2009 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

Pada Lampiran I dan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21/7/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 32

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 21-7-2009


BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

32/2009

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR : 32 TAHUN 2009
 TANGGAL : 21-7-2009

KABUPATEN KUBU RAYA
RINGKASAN PERUBAHAN KELIMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1,1	Pendapatan Asli Daerah	10.138.590.000,00	10.138.590.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Pajak Daerah	6.080.402.000,00	6.080.402.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Retribusi Daerah	2.199.290.000,00	2.199.290.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.858.898.000,00	1.858.898.000,00	0,00	0,00
1,2	Dana perimbangan	426.063.501.000,00	426.063.501.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	32.048.561.000,00	32.048.561.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	375.546.940.000,00	375.546.940.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	18.468.000.000,00	18.468.000.000,00	0,00	0,00
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	22.541.843.487,00	25.499.454.487,00	2.957.611.000,00	13,12
1.3.1	Hibah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	7.991.843.487,00	7.991.843.487,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	2.957.611.000,00	2.957.611.000,00	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.050.000.000,00	7.050.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	458.743.934.487,00	461.701.545.487,00	2.957.611.000,00	0,64

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA DAERAH				
2,1	Belanja Tidak Langsung	35.639.114.640,00	35.639.114.640,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	5.428.624.640,00	5.428.624.640,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	7.565.000.000,00	7.565.000.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.923.490.000,00	2.923.490.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	18.522.000.000,00	18.522.000.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
2,2	Belanja Langsung	171.485.319.625,00	174.442.930.625,00	2.957.611.000,00	1,72
2.2.1	Belanja Pegawai	13.396.902.900,00	13.396.902.900,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.979.943.900,00	58.161.943.900,00	182.000.000,00	0,31
2.2.3	Belanja Modal	100.108.472.825,00	102.884.083.825,00	2.775.611.000,00	2,77
	Jumlah Belanja	207.124.434.265,00	210.082.045.265,00	2.957.611.000,00	1,43
	Surplus/ (Defisit)	251.619.500.222,00	251.619.500.222,00	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3,1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21/7/2009
P1t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 32

BUPATI KUBU RAYA


MUDA MAHENDRAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Urusan Pemerintahan : 1.06 Perencanaan Pembangunan
 Organisasi : 1.06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.06 1.06.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 1.06.01 00 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 1.06.01 00 00 4 1 1	Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 1.06.01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 1.06.01 00 00 4 1 3	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 1.06.01 00 00 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06 1.06.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	6.686.865.500,00	6.686.865.500,00	0,00	0,00	
1.06 1.06.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.254.568.000,00	1.254.568.000,00	0,00	0,00	
1.06 1.06.01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	1.254.568.000,00	1.254.568.000,00	0,00	0,00	
1.06 1.06.01 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	1.254.568.000,00	1.254.568.000,00	0,00	0,00	
1.06 1.06.01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	835.148.106,00	835.148.106,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06 1.06.01 00 00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	116.435.694,00	116.435.694,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06 1.06.01 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	170.885.000,00	170.885.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06 1.06.01 00 00 5 1 1 01 05	Tunjangan Fungsional Umum	9.555.000,00	9.555.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06 1.06.01 00 00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	83.772.889,00	83.772.889,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06 1.06.01 00 00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	38.771.177,00	38.771.177,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06 1.06.01 00 00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	134,00	134,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06 1.06.01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	5.432.297.500,00	5.432.297.500,00	0,00	0,00	
1.06 1.06.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	402.000.000,00	402.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 1.06.01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 1.06.01 01 01 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06 1.06.01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	0,00	
1.06 1.06.01 01 07 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06 1.06.01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.06 1.06.01 01 08 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06 1.06.01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.002.000,00	30.002.000,00	0,00	0,00	

1				2		3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	01	10 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	30.002.000,00	30.002.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	01	11 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	01	17 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	01	18 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	01	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	01	19 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	02		<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</u>	373.132.000,00	373.132.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	02	05 5 2 3	BELANJA MODAL	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	15.205.000,00	15.205.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	02	07 5 2 3	BELANJA MODAL	15.205.000,00	15.205.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	77.112.000,00	77.112.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	02	09 5 2 3	BELANJA MODAL	77.112.000,00	77.112.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	02	24 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	02	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	02	30 5 2 2	BELANJA PEGAWAI	815.000,00	815.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	05		<u>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</u>	133.393.000,00	133.393.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	133.393.000,00	133.393.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	05	03 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	133.393.000,00	133.393.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	06		<u>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</u>	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	06	01 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	06	01 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	06	04 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	06	04 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	15		<u>Program Pengembangan Data Informasi</u>	1.256.000.000,00	1.256.000.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	15	02	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	15	02 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	15	05	Penyusunan Profil Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	15	05 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	15	05 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	13.675.000,00	13.675.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	15	07	Penyusunan Jaringan Data Spasial Nasional (JSDN) Perencanaan	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00	0,00		
1.06	1.06.01	15	07 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	15	07 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	548.025.000,00	548.025.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan	
1.06	1.06.01	15	08	Profil Investasi daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00		

1							2	3	4	5	6	7
1.06	1.06.01	15	08	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	15	08	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	41.925.000,00	41.925.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	15	08	5	2	3	BELANJA MODAL	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	15	09				Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.01	15	09	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	15	09	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	72.925.000,00	72.925.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	15	10				Penyusunan Sistem Informasi, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan dan Realisasi Pengembangan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.01	15	10	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	18					Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.01	18	03				Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.01	18	03	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	21					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	810.000.000,00	810.000.000,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.01	21	02				Penyusunan Rancangan RPJPD 2009-2014	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.01	21	02	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	21	02	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	21	05				Penyusunan Rancangan RPJMD 2009-2014	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.01	21	05	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	182.500.000,00	182.500.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	21	05	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	21	09				Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.01	21	09	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	21	09	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	21	10				Penyusunan RKPD Tahun 2010	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.01	21	10	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	21	10	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	21	13				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.01	21	13	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	67.200.000,00	67.200.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	21	13	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	122.800.000,00	122.800.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	22					Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.01	22	03				Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.01	22	03	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	24					Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	88.490.000,00	88.490.000,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.01	24	04				Koordinasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	88.490.000,00	88.490.000,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.01	24	04	5	2	1	BELANJA PEGAWAI	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.06	1.06.01	24	04	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	70.990.000,00	70.990.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.05	1.06.01	15					Program Perencanaan Tata Ruang	820.000.000,00	820.000.000,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.01	15	04				Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Kabupaten Kubu Raya Sumber dana : Dana Alokasi Umum
1.06	1.06.01	15	04	5	2	2	BELANJA BARANG DAN JASA	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	0,00	
1.06	1.06.01	15	04	5	2	2 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	04	5	2	2 01 01	Belanja alat tulis kantor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	Semula Dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000,- untuk keperluan belanja alat tulis kantor
1.06	1.06.01	15	04	5	2	2 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.06	1.06.01	15	04	5	2	2 03 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	Semula Dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,-

1	2	3	4	5	6	7
						untuk keperluan belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang
1.06 1.06.01 15 04 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00	
1.06 1.06.01 15 04 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	Semula Dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 8 000 000,- untuk keperluan belanja cetak
1.06 1.06.01 15 04 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	Semula Dana ini tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1 000 000,- untuk keperluan belanja penggandaan
1.06 1.06.01 15 04 5 2 2 19	Belanja Jasa Konsultansi	700 000 000,00	675 000 000,00	(25 000 000,00)	(3,57)	
1.06 1.06.01 15 04 5 2 2 19 01	Belanja Jasa Perencanaan	700 000 000,00	675 000 000,00	(25 000 000,00)	(3,57)	Semula dianggarkan sebesar Rp. 700 000 000,-, setelah perubahan berkurang menjadi Rp. 675 000 000,- untuk keperluan belanja jasa perencanaan dengan rincian : - penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir dan pantai = Rp. 475 000 000,- - penyusunan rencana tata ruang wilayah Kec. Teluk Pakedai = Rp. 200 000 000,-
1.05 1.06.01 15 16	Redesain Master Plan Kawasan Kota Terpadu mandiri Rasau Jaya	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.05 1.06.01 15 16 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	4 190 000,00	4 190 000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.05 1.06.01 15 16 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	115 810 000,00	115 810 000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.05 1.06.01 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	156.782.500,00	156.782.500,00	0,00	0,00	
1.05 1.06.01 17 09	Penyusunan Rancangan Perda RTRW	156.782.500,00	156.782.500,00	0,00	0,00	
1.05 1.06.01 17 09 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	36 090 000,00	36 090 000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.05 1.06.01 17 09 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	120 692 500,00	120 692 500,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.23 1.06.01 15	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	
1.23 1.06.01 15 03	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.23 1.06.01 15 03 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	83 975 000,00	83 975 000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.23 1.06.01 15 03 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	41 025 000,00	41 025 000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.23 1.06.01 15 05	Penyusunan Kabupaten Dalam Angka Tahun 2009	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.23 1.06.01 15 05 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	64 200 000,00	64 200 000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.23 1.06.01 15 05 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	35 800 000,00	35 800 000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.23 1.06.01 15 06	Penyusunan Indeks Kemiskinan Masyarakat (IKM)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.23 1.06.01 15 06 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	26 425 000,00	26 425 000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.23 1.06.01 15 06 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	23 575 000,00	23 575 000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
	SURPLUS / DEFISIT	(6.686.865.500,00)	(6.686.865.500,00)	0,00	0,00	

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 21/7/2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009 NOMOR 32

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN